

**KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV.69 JAKARTA 12190
TELEPON (021)7398381-7398382, FAKSIMILE (021) 7398323 SITUS <https://www.menpan.go.id>

**KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 TAHUN 2026**

**TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan kualitas pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Program Pembentukan Peraturan Menteri di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembar Negara Reublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
4. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 374);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 278);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Daftar Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Kementerian ini sebagai Program Pembentukan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026.

- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Menteri di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Pemrakarsa menginformasikan perkembangan penyusunan berdasarkan Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu setiap triwulan kepada Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.
- KEEMPAT : Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum melakukan verifikasi atas perkembangan realisasi Program Pembentukan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga untuk selanjutnya dilaporkan Kepada Menteri.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Mei 2026

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,



Tembusan:

1. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan;
2. Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana;
3. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur;
4. Deputi Bidang Pelayanan Publik;
5. Deputi Bidang Transformasi Digital Pemerintahan;
6. Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama;
7. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum;
8. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi;
9. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik;
10. Kepala Biro Umum dan Keuangan; dan
11. Inspektur Kementerian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI
NOMOR 224 TAHUN 2026
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2026

DAFTAR PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
TAHUN 2026

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Kedeputan Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas dan Pengawasan						
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Road Map Reformasi Birokrasi (2025-2030)	Sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2025-2045	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	Seluruh Instansi K/L/D	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Karena turunan DBRBN, menunggu perpres jadi terlebih dahulu; 2. Sudah dikerjakan paralel dengan DBRBN; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			dan Reformasi Birokrasi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029			
2	Rancangan Peraturan Menteri tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi	Sebagai pedoman dalam melakukan evaluasi reformasi birokrasi	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029	Seluruh Instansi K/L/D	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dilakukan pembahasan internal reformasi birokrasi; 2. Draft belum dilakukan pembahasan dengan layanan hukum; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Kedeputan Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Penilaian Kapabilitas Kelembagaan Pada Instansi Pemerintah	Instrumen evaluasi bidang kelembagaan dan tata laksana disusun dan digunakan untuk mendukung instrumen penilaian RB khususnya pada sasaran 4 Roadmap RB 2025-2029 Kelembagaan dengan hasil indeks	Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2018 tentang Evaluasi kelembagaan	Seluruh Instansi K/L	Lungsuran 2023 dan 2024	Konfirmasi Klarifikasi 1. Terdapat perbaikan pada susunan peraturan khususnya lampiran permen 23 /2025; 2. Akan dilakukan penyempuranaan rancangan peraturan mengenai penilaian kapabilitas tersebut; 3. Akan dilakukan harmonisasi kembali terhadap rancangan peraturan menteri tentang penilaian kapabiitas kelembagaan; dan 4. Masih pembahasan bersama pihak terkait 5. Terkonfirmasi.
2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pedoman Manajemen Proses Bisnis pada Instansi Pemerintah	Disusun untuk mengintegrasikan Permen PANRB No. 35 Tahun 2012 dan Permen PANRB No. 19 Tahun 2018 sekaligus	1. Peraturan Menteri PANRB No 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP	Seluruh Instansi K/L/D	Lungsuran 2024	Konfirmasi Klarifikasi 1. Akan dilakukan finalisasi rancangan peraturan menteri tentang manajemen probis;

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		menambahkan Substansi tata cara evaluasi peta proses bisnis pada instansi pemerintah	2. Peraturan Menteri PANRB No 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah			2. Menambahkan lampiran berupa contoh penggambaran proses bisnis dari instansi Kemenpanrb; 3. Masih pembahasan dengan pihak terkait; dan 4. Terkonfirmasi.
Kedeputan Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur						
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Bidang Karantina	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB. 2. Badan Karantina Indonesia. 3. Kementerian Hukum. 4. Badan Kepegawaian Negara.	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Lungsuran ke tahun 2026; 2. Menunggu tanggapan dari instansi pembina; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
2	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS	1. Kementerian PANRB. 2. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 3. Kementerian Hukum. 4. Badan Kepegawaian Negara.	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih menunggu penetapan Menteri PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Arsiparis	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor	1. Kementerian PANRB. 2. Arsip Nasional Republik Indonesia.	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	3. Kementerian Hukum. 4. Badan Kepegawaian Negara.		

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
4	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Agraria dan Tata Ruang	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian ATR/BPN 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
5	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	Disusun untuk memberikan pengakuan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu sebagai pegawai ASN dan sebagai landasan dalam pembayaran gaji	-	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Keuangan 3. Badan Kepegawaian Negara 4. Kementerian Hukum	Usulan baru	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah selesai Harmonisasi Internal; 2. akan dilakukan permohonan harmonisasi ke kemenkum; dan 3. Terkonfirmasi.
6	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2024 tentang Jabatan Fungsional Guru menjadi Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawas Mutu Pendidik	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan Baru	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah selesai Harmonisasi; 2. menunggu surat selesai; dan harmonisasi dari kemenkum.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing. Sebelumnya diatur dalam PermenPANRB 21/2024 tentang Jabatan Fungsional Guru, yang didalamnya adanya penyesuaian nomenklatur 3	Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		Jabatan Fungsional lainnya (Pamong Belajar, Penilik, dan Pengawas Sekolah) menjadi Jabatan Fungsional di Bidang Pendidik dan Pengawas Mutu Pendidik yang dilakukan penyelarasan terhadap 4 Jabatan Fungsional (Guru, Pengawas Sekolah, Penilik, dan Pamong Belajar)				
7	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Lingkungan Hidup	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Lingkungan Hidup 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Pembahasan rancangan PermenPANRB dan validasi hasil uji beban kerja; 2. Penyusunan dan pembahasan draft rancangan dengan instansi Pembina; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
8	Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Lingkungan Hidup 3. Kementerian Hukum	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah ditetapkan PermenPANRB Nomor 2 tahun 2026

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	4. Badan Kepegawaian Negara		

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
9	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri PANRB Nomor 16 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah	Sebelumnya instansi pembinanya adalah Sekretariat Kabinet. Namun dengan adanya Kabinet Merah Putih, adanya penggabungan instansi ke Kementerian Sekretariat Negara	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Sekretariat Negara 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dimasukkan lungsuran ke tahun 2026; dan 2. Terkonfirmasi.
10	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Narkotika	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam	4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan	5. Kementerian PANRB 6. Badan Narkotika Nasional 7. Kementerian Hukum 8. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah dilakukan ekspose dan proses saat ini sedang dilakukan telaahan oleh Badan Narkotika Nasional; 2. Koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional masih dalam penyusunan rancangan draf; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 6. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
11	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Transportasi	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang	1. Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Menunggu jadwal harmonisasi dari Kemenkum; dan

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan	Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	2. Kementerian Perhubungan 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara		2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		fungsional di masing-masing.				
12	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Badan Standardisasi Nasional 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose dan proses saat ini dalam tahap telaahan; 2. Penyusunan draf; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
13	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Badan Pengawas Pemilihan Umum 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Penyusunan draf dan pembahasan dengan bawaslu; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
14	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Siber dan Sandi	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang	1. Kementerian PANRB 2. Badan Siber dan Sandi Negara 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Pembahasan dan penyusunan dengan Badan Siber Sandi Negara; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
15	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor	1. Kementerian PANRB 2. Lembaga Perlindungan Saksi Korban	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Validasi uji beban kerja; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara		

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
16	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Perpustakaan	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang eksisting harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Perpustakaan Nasional 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Tahap pembahasan internal; dan 3. Terkonfirmasi

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
17	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hukum	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1 tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Hukum 3. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Tahap pembahasan dan telaahan internal; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.				
18	Rancangan Peraturan Menteri tentang Jabatan Fungsional di Bidang Hubungan Luar Negeri	Dalam rangka untuk mendukung organisasi yang lebih profesional lincah dan dinamis pasca penyederhanaan birokrasi, posisi jabatan fungsional memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan suatu organisasi. Jabatan Fungsional yang existing harus dilakukan simplifikasi sesuai dengan PermenPANRB No 1	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Luar Negeri 3. Kementerian Hukum 4. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Tahap pembahasan dan telaahan internal; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		tahun 2023. Diharapkan dengan adanya simplifikasi ini, dapat mengakselerasi kinerja para pejabat fungsional dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional. Untuk itu, Instansi perlu melakukan penyesuaian peraturan yang mengatur jabatan fungsional di masing-masing.	2023 tentang Jabatan Fungsional			
19	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pelaksanaan Penyesuaian Nomenklatur Jabatan Fungsional	Transformasi tata kelola Jabatan Fungsional dilaksanakan sebagai salah satu upaya peningkatan efektivitas organisasi melalui penyederhanaan tugas jabatan fungsional dan penyederhanaan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11	1. Kementerian PANRB 2. Kementerian Hukum 3. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan ekspose; 2. Tahap pembahasan K/L terkait; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		nomenklatur jabatan fungsional. Namun demikian, penyederhanaan nomenklatur jabatan fungsional berdampak terhadap perubahan nomenklatur jabatan fungsional yang telah ditetapkan, sehingga perlu dilakukan disesuaikan dan untuk menjamin kepastian hukum dan keberlanjutan pengembangan karier Pejabat Fungsional dalam penyesuaian nomenklatur Jabatan Fungsional	Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional			
20	Rancangan Peraturan Menteri tentang Penguatan Budaya Kerja BerAKHLAK pada Instansi Pemerintah	-	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1. Kementerian PANRB 2. Badan Kepegawaian Negara 3. Badan Riset Inovasi Nasional	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah dibahas dengan Badan Kepegawaian Negara; 2. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
				4. Kementerian Hukum		
21	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara	Penyempurnaan substansi karena melihat adanya kendala-kendala teknis yang terjadi di lapangan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan terhadap Peraturan Pemerintah 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	1. Kementerian PANRB 2. Badan Kepegawaian Negara 3. Kementerian Hukum	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.
22	Rancangan Perubahan Peraturan Menteri 20 Tahun 2021 tentang Seleksi Penerimaan	Penyempurnaan substansi karena melihat adanya kendala-kendala	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	1. Kementerian PANRB 2. Badan Kepegawaian Negara	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Mahasiswa/Praja/Taruna pada Kementerian/ Lembaga	teknis yang terjadi di lapangan		3. Kementerian Hukum 4. Kementerian Dalam Negeri 5. Kementerian Keuangan 6. Kementerian Imipas 7. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika 8. Badan Siber Sandi Negara 9. Badan Pusat Statistik Indonesia		
Kedeputan Bidang Pelayanan Publik						
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Peta Jalan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2025 – 2029	(Revisi Peraturan Menteri PANRB Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dilandasi oleh kebutuhan untuk	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 2. Perpres Nomor 96 Tahun 2012 3. Perpres Nomor 76 Tahun 2013 4. Perpres Nomor 47 tahun 2021	Seluruh instansi pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara yang terhubung pada Sistem Pengelolaan	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		memperkuat kerangka kebijakan pengelolaan pengaduan dalam menghadapi dinamika pelayanan publik yang semakin kompleks. Revisi regulasi ini memiliki beberapa tujuan strategis yang saling terkait dan mendukung satu sama lain.	5. PermenPANRB Nomor 46 Tahun 2020 6. PermenPANRB Nomor 60 Tahun 2021	Pengaduan Pelayanan Publik Nasional-LAPOR!		
2	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Perubahan Peraturan Menteri No. 92 Tahun 2021)	Proses atau tahapan pengusulan pembentukan Mal Pelayanan Publik yang diatur di dalam PermenPANRB 92/2021 belum dapat mengakomodir kebijakan percepatan pembentukan Mal Pelayanan Publik di setiap kabupaten/kota untuk itu perlu disempurnakan sebagaimana Perpres 89/2021 yang akan	1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009; 2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2012; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; 4. Perpres 132 Tahun 2022; 5. Permendagri Nomor 18 Tahun 2016;	1. Kementerian Dalam Negeri, 2. Kementerian Investasi/Ba dan Koordinasi Penanaman Modal 3. Kementerian Komunikasi dan Informatika.	Lungsuran 2024	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		diperbaiki. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut terkait mekanisme pengelolaan (operasional) Mal Pelayanan Publik agar dapat memberikan kepastian hukum dan petunjuk bagi penyelenggara dalam mengelola Mal Pelayanan Publik.	Permendagri Nomor 25 Tahun 2021			
3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Indeks Pelayanan Publik	Penyusunan Permen ini merupakan langkah konkret untuk mencapai target IPP nasional sebesar 5,00 pada tahun 2045. Regulasi ini memberikan kerangka kerja yang jelas bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik			
4	Rancangan Peraturan Menteri Perubahan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Arahan Menteri PANRB untuk memperkuat pengaturan tata kelola Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional pada tingkat mikro, diperlukan pengaturan yang memiliki daya ikat lebih kuat dibandingkan Surat Edaran. Oleh karena itu, ketentuan tata kelola mikro yang semula direncanakan diatur melalui Surat Edaran perlu diintegrasikan ke dalam Perubahan Peraturan Menteri guna menjamin kepastian hukum, konsistensi	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 3. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PANRB No. 5 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	1. Kementerian Komunikasi dan Digital 2. Kementerian Dalam Negeri	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		implementasi, dan efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional di seluruh Kementerian/Lembaga /Pemerintah Daerah.				
5	Rancangan Peraturan Menteri tentang Standar Pelayanan	1. Menyesuaikan instrumen standar pelayanan dengan perkembangan masyarakat, tata kelola pemerintahan, dan transformasi digital pelayanan publik. 2. Pedoman yang selama ini digunakan, yaitu PermenPANRB Nomor 15 Tahun 2014, telah diterapkan hampir satu dekade dan dinilai belum sepenuhnya	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undangn 25/2009	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Sudah disusun naskah urgensi; dan 2. Sedang dilakukan penyusunan rancangan awal Peraturan Menteri.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		mengakomodasi dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks, digital, dan beragam. 3. Perbedaan pemahaman jenis pelayanan, kompleksitas pemenuhan komponen standar pelayanan, keterbatasan integrasi standar pelayanan dengan sistem manajemen kinerja, serta belum optimalnya aspek inklusivitas dan partisipasi masyarakat.				
6	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Perluasan Cakupan Aksesibilitas Pelayanan Publik	1. Mewujudkan pelayanan publik yang inklusif, mudah diakses oleh setiap	1. Undang-Undang Nomor 25 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999	Seluruh instansi pemerintah	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah disusun naskah urgensi;

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		pengguna layanan dan terintegrasi secara konsisten, selaras, dan berkesinambungan 2. Penyelenggaraan pelayanan publik tidak memiliki pedoman atau standar standar penyelenggaraan pelayanan publik yang memberikan alternatif kanal layanan 3. Menjamin tersedianya akses pelayanan publik melalui mekanisme omnikanal sesuai dengan karakteristik jenis pelayanan, kebutuhan masyarakat, dan kapasitas penyelenggara	3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 5. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021			2. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		secara bertahap dan terukur	9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024			
7	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Ekosistem Inovasi Pelayanan Publik	Simplifikasi dan harmonisasi regulasi melalui pengintegrasian pengaturan inovasi pelayanan publik yang sebelumnya tersebar dalam tiga peraturan menteri menjadi satu peraturan yang menguatkan tata kelola ekosistem inovasi pelayanan publik. Peraturan menteri yang baru akan mencabut tiga peraturan menteri yang ada yaitu: 1) PermenPANRB 89/2020, 2) PermenPANRB	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 2. PP Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25/2009 3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jaringan Inovasi Pelayanan Publik 4. Peraturan Menteri PANRB Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 5. Peraturan Menteri PANRB Nomor 91	1. Kementerian Dalam Negeri 2. Lembaga Administrasi Negara 3. Badan Riset dan Inovasi Nasional	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah disusun naskah urgensi; 2. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
		7/2021, 3) PermenPANRB 91/2021.	Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik			
Kedeputian Transformasi Digital Pemerintah						
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital	Termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, adanya target Indeks Pemdi	1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Seluruh Instansi K/L/D	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Menunggu jadwal harmonisasi; dan 2. Terkonfirmasi.
Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum						
1	Rancangan Peraturan Menteri PANRB tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB	Melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	1. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2023 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Lembaran Negara	1. Kementerian PANRB	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Menunggu jadwal harmonisasi; dan 2. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 78); 2. Peraturan Menteri PANRB Nomor 90 Tahun 2020 tentang Perubahan Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian PANRB			
2	Rancangan Pencabutan Peraturan Menteri Nomor 42 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Adanya perkembangan kebijakan, regulasi, dan kebutuhan organisasi yang terjadi di lingkungan Kementerian PANRB, khususnya dalam pengelolaan arsip kepegawaian. Saat ini, PermenPANRB No. 42 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai	1. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. PP Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 43 Tahun 2009 3. Peraturan Presiden Nomor 178 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendayagunaan	Kementerian PANRB	Lungsuran 2025	Konfirmasi TW 3 1. Penyusunan draft dan masukan internal; dan 2. Target 2025 selesai. Konfirmasi TW 4 1. Draf sudah selesai dan rencana permohonan; permintaan legal drafting 2. Lungsuran tahun depan;

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
	Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	Negeri Sipil dan Pejabat Negara di Lingkungan Kementerian PANRB sudah kurang relevan, sehingga dibutuhkan pembentukan pedoman guna penyesuaian pengelolaan arsip kepegawaian yang tercipta dari setiap kegiatan dalam organisasi.	Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Kepegawaian 5. PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian PANRB 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan			

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
			Reformasi Birokrasi Nomor 144 Tahun 2022 tentang Pembentukan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi			
3	Rancangan Peraturan Menteri tentang Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian PANRB	Mengenai siklus dan tata cara pelaksanaan Manajemen Talenta di lingkungan Kementerian PANRB	1. Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri PANRB No. 20 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta ASN 2. Peraturan Menteri PANRB No. 19 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Merit dalam Manajemen ASN	Kementerian PANRB	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dalam tahap pembahasan internal; dan; 2. Modifikasi draft pedoman dari yang sebelumnya sudah ada pada tahun 2025 sesuai dengan masukan Komite Talenta; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
Biro Umum dan Keuangan						
1	Rancangan Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Permenpan Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Pedoman Keprotokolan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sudah tidak relevan serta diperlukan upaya optimalisasi layanan keprotokolan dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan acara di lingkungan Kementerian PANRB	1. UU Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Keprotokolan	Kementerian PANRB	Lungsuran 2025	Konfirmasi Klarifikasi 1. Masih dalam tahap pembahasan internal Kementerian PANRB; dan 2. Terkonfirmasi.
INSPEKTORAT						

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
1	Rancangan Pencabutan Peraturan Menteri PANRB No. 26 Tahun 2018 tentang Laporan Harta Kekayaan Negara	Perlu segera dilakukan penyusunan oleh karena akhir tahun harus dilakukan pemutahiran wajib lapor!	Peraturan Menteri tersebut sudah tidak lagi selaras dan relevan dengan kebijakan yang saat ini berlaku, utamanya terkait pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara di lingkungan Kementerian PANRB yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi.	1. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas 2. Peraturan KPK Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. 3. Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan KPK Nomor	Usulan baru Tahun 2026	Konfirmasi Klarifikasi 1. Telah dilakukan Harmonisasi dan mendapatkan Saimon; 2. Menunggu penetapan; dan 3. Terkonfirmasi.

No	Judul Peraturan	Urgensi Pembentukan	Peraturan/ Kebijakan Terkait	Instansi Terkait	Status Rancangan	Keterangan
				7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara		
Biro Komunikasi dan Informasi Publik						
1	Rancangan Peraturan Menteri tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	Perlu adanya penyesuaian terkait dengan substansi pengaturan baik itu format, serta adanya update terkait instrumen hukum lainnya yang digunakan dalam penyusunan pengaturan di Lingkungan kementerian PANRB	UU 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Permenpan No. 1 tahun 2025 tentang OTK	Kementerian PANRB	Lungsuran 2023	Konfirmasi Klarifikasi 1. Dilakukan setelah Pedoman PANRB tentang Tata Naskah Dinas disahkan; dan 2. Terkonfirmasi.

SEKRETARIS KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK
INDONESIA,

